

PENDIDIKAN ZAMAN ORDE BARU: UPAYA MELANGGENGKAN KEKUASAAN SOEHARTO**Megiridha Loppies *¹**¹ Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia.¹Email: megiridhaloppies91@gmail.com**Abstrak**

Rezim orde baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga bulan Mei 1998 memperlihatkan keterlibatan tentara (Angkatan Darat) dalam politik pemerintahan di Indonesia yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan perkembangan pendidikan pada masa orde baru sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dari berbagai literatur berupa buku-buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan topik yang di bahas. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto berpijak pada penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Sistem pendidikan yang diterapkan mengindoktrinasikan agar peserta didik patuh kepada negara (penguasa) sebagai salah satu upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. Penerapan pendidikan lebih diorientasikan kepada peningkatan target kuantitas dari pada peningkatan kualitas pendidikan, dimana pemerintah orde baru berhasil melakukan pemberantasan buta aksara melalui program wajib belajar, pembentukan kelompok belajar (kejar), dan pembangunan SD Inpres. Nuansa militerisme yang kental dalam sistem pendidikan membuat peserta didik menjadi manusia yang lemah mental dan tidak berdaya kritis. Pengajaran sikap kritis kepada peserta didik dikhawatirkan akan memunculkan sikap kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan lebih berorientasi untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berdaya guna untuk menggerakkan roda perekonomian.

Kata Kunci: Pendidikan; Zaman Orde Baru**Abstract**

The New Order regime started from 1966 to May 1998 showed the involvement of the army (Army) in politics government in Indonesia, which also influence educational policies in Indonesia. This study aims to examine and describe the development of education during the New Order era as a form of pure and consistent implementation of the values of Pancasila and the 1945 Constitution. The research method used is a literature study using a comparative descriptive analysis of various literature in the form of books and journal articles that are relevant to the topics discussed. The findings show that the New Order government led by President Suharto was based on the pure and consistent application of Pancasila and the 1945 Constitution which was politicized to perpetuate his power. The applied education system indoctrinates students to obey the state (rulers) as one of the efforts to perpetuate Suharto's power. The implementation of education was more oriented towards increasing quantity targets rather than improving the quality of education, in which the New Order government succeeded in eradicating illiteracy through the compulsory education program, forming study groups (chasing), and building Inpres SD. The thick nuance of militarism in the education system makes students mentally weak and powerless to be critical. It is feared that teaching critical attitudes to students will lead to criticism of the government. Therefore, the implementation of

education that is held is more oriented towards producing Indonesian people who are efficient in moving the wheels of the economy.

Keywords: Education; Orde Baru Regime



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hasil pendidikan yang kita nikmati saat ini tentu merupakan kelanjutan dari proses pendidikan pada masa lalu. Berbagai persoalan dalam bidang pendidikan menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Persoalan yang terjadi bukan saja soal kualitas dan kuantitas pendidikan, tetapi juga menyangkut kepentingan-kepentingan elit birokrasi dan elit pendidikan di negeri ini. Dikutip dari Mukodi, (2016), bahwa pendidikan selalu berpaut pada politik kepemimpinan (*leadership*) yang berkuasa. Dengan demikian, peletakkan dasar-dasar pendidikan oleh suatu rezim pemerintahan pada hakikatnya berpangkal pada perpolitikan suatu bangsa. Demikian juga arah dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia selalu dinamis dan adaptif sesuai dengan kepentingan penguasa. Sejarah menunjukkan bahwasannya dunia pendidikan di Indonesia dari satu rezim ke rezim selanjutnya penuh dengan dinamika dan persolan. Di antaranya adalah persoalan konsep dan arah pendidikan, ketidakjelasan kebijakan dan sistem yang melingkupinya serta buruknya metode dan evaluasi pengajaran (Mukodi, 2016). Hal ini berdampak pula pada *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari sistem pendidikan tersebut.

Rezim orde baru adalah suatu periode pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1966 hingga bulan Mei 1998. Orde baru merupakan periode pemerintahan terpanjang sejak berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia sampai saat ini. Menurut Hadi & Kasuma, (2012) rezim orde baru berhasil memperoleh legitimasi kekuasaan dengan berbagai cara, diantaranya melalui jalan propaganda pembangunan. Sejak dikeluarkannya TAP MPR Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Inilah titik awal dimulainya rezim orde baru. Saat itu, Soekarno masih menduduki jabatan kepresidenan, namun dalam hal kebijakan negara, politik internasional, dan konsepsi Haluan Negara, TAP MPR Nomor XXIII/MPRS/1966 sejatinya telah menjadi legitimasi untuk melucuti kekuasaan

eksekutorialnya (Putra, 2023). Dari sinilah sejarah panjang orde baru dimulai.

Lewat sidang umum MPR tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno (Naimah, 2015; Toni & Utama, 2021). Pengangkatan dilakukan setelah presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban berjudul Nawaksara, namun ditolak oleh MPRS pada 17 Februari 1967 (Saputro, 2018). Setahun setelah itu, Soeharto kembali mendapatkan dukungan yang cukup solid dari anggota MPRS melalui Tap MPRS No XVIV/MPRS/1968 Soeharto dilantik sebagai presiden Indonesia. Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun (Saputro, 2018). Dalam pemerintahannya, Soeharto berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan pasca peristiwa 1965. Kebijakan stabilitas politik dan keamanan tersebut melibatkan tentara (Angkatan Darat) dalam praktek politik dan pemerintahan di Indonesia (Fatgehipon, 2010). Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah orde baru mampu memaksakan rakyat untuk patuh dan tunduk terhadap segala kebijakan pemerintah, baik yang persuasive maupun represif. Partai Golkar muncul sebagai kekuatan politik utama yang dominan (Suwirta, 2018). Dominasi partai Golkar tersebut tentu saja telah membatasi ruang gerak dari partai lain seperti PDI dan PPP, sehingga lebih menguntungkan bagi partai Golkar untuk menjamin eksistensinya dalam pemerintahan orde baru. Sementara DPR dan MPR adalah dua institusi yang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan presiden. Sebagai kepala Negara, Soeharto berhak menunjuk pembagian kursi seperlima anggota DPR dan tiga per lima anggota MPR (Hadi & Kasuma, 2012).

Tentara (AD) dan partai Golkar adalah dua alat yang digunakan untuk menanamkan pengaruh dan kebijakan politik Soeharto. Pengaruh militerisme yang kental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa rezim orde baru merupakan suatu rezim pemerintahan yang otoriter sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia. Di samping itu, penerapan sistem ideologi sentralistik yang turut memberikan

pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan sehingga semua kebijakan pendidikan dilaksanakan dan dikontrol dari pusat. Demikianlah Pancasila dan UUD 1945 dipolitisasi sebagai dua asas yang dianut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional saat itu.

Menurut Kurniawati, (2017), rezim orde baru memandang dirinya sebagai rezim akhir yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Hal itu terlihat jelas dalam buku sejarah nasional jilid keenam yang menampilkan peran Soeharto dalam menyelamatkan negara dan keberhasilannya membangun sebuah pemerintahan baru yang stabil dan berorientasi pada pembangunan. Sejalan dengan itu, Tilaar dalam (Mukodi, 2016) berpandangan bahwa orde baru menandakan lahirnya suatu orde pembangunan yang ingin membawa bangsa dan masyarakat Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Menurut Mohamad Ali dalam Sugiyono et al., (2017), target minimal pembangunan pendidikan zaman orde baru adalah terbentuknya pengetahuan dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung dan penggunaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, peran strategis pendidikan cukup disadari oleh pemerintah orde baru (Soeharto) sehingga pendidikan tidak sepenuhnya dijalankan dengan tujuan murni untuk mencerdaskan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan lebih berorientasi untuk mendukung sektor ekonomi yang menjadi fokus utama pembangunan kala itu (Rajab, 2022). Sejak saat itu pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintah Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat Indonesia untuk melanggengkan kekuasaannya.

Selama kurang lebih 32 tahun berkuasa, rezim orde baru telah banyak melakukan penyimpangan. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dipelopori sebelumnya. Banyak pihak merasa Pancasila dan UUD 1945 hanya politisasi untuk tunduk kepada Negara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat kecil. Berbagai penyimpangan yang dilakukan rezim orde baru mengorbankan rakyat kecil demi memuluskan tujuan elit politik rezim orde baru. Beberapa penyimpangan tersebut antara lain, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), kriminalisme dan pelanggaran HAM, utang luar negeri, oligarki ekonomi, dan kebijakan ekonomi yang terlalu liberal. (Hariyadi, 2021; Suwirta, 2018) serta manipulasi mengenai kekuasaan Negara terhadap rakyat Indonesia (Aprianto, 2021). Hal senada diuraikan oleh Hanugrah & Hardi, (2019), dalam tulisannya mengkaji penyimpangan politik

dari kacamata karya sastra menyebutkan bahwa rezim orde baru dibangun di atas berbagai kebohongan dan fitnah, berbagai kudeta militer, pelanggaran hak asasi manusia, dibangun diatas lumuran darah berjuta rakyat. Hal yang sama ditegaskan pula oleh Febriyanti & Haryanti, (2021) dalam tulisannya mengenai kekerasan rezim orde baru dalam empat cerpen Indonesia modern bahwa kekerasan yang dilakukan rezim orde baru adalah pelanggaran HAM dan tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang atau kelompok, termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak. Penyimpangan tersebut seringkali terjadi akibat kelalaian secara hukum yang berusaha mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok (Febriyanti & Haryanti, 2021).

Dinamika birokrasi otoriter dan spekulatif yang mewarnai kehidupan zaman orde baru tentu berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah termasuk bidang pendidikan. Lantas bagaimanakah arah dan tujuan pendidikan Indonesia pada masa orde baru? Apa sajakah kebijakan yang dibuat pemerintah orde baru untuk memajukan pendidikan pada masa itu? Sejauh mana sistem pendidikan zaman orde baru dapat menjawab persoalan kualitas sumber daya manusia pada masa itu? Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan mengkonstruksikan perkembangan pendidikan zaman orde baru yang dipolitisasi Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*literature review*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan jalan menelaah buku-buku, artikel jurnal, dan artikel media masa yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Studi pustaka ini bertujuan untuk menelaah dan mengonstruksi konsepsi secara lebih kuat dan akurat melalui pemanfaatan sumber pustaka untuk menemukan data yang berkaitan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh basis penelitian-penelitian empiris yang relevan dengan topik permasalahan (Syahputra et al., 2020). Pada penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka untuk menganalisis dan mengkonstruksi data guna menjawab persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pada masa orde baru dinilai hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan orde baru (Soeharto) melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi dan regulasi yang tidak memihak kepada rakyat (Tati, 2017). Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdikan kepada rakyat tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan.

Pendidikan menjadi salah satu kebijakan politik dan pemerintahan yang terangkum dalam rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) pada masa itu. Orientasi pendidikan diarahkan untuk menyokong pembangunan nasional orde baru. Di samping itu, sebagaimana sistem politik yang dianut oleh pemerintah mengakibatkan manajemen pendidikan yang diterapkan secara sentralistik. Semua kebijakan sampai detail ditentukan oleh pusat. Sekolah sebagai lembaga yang langsung melaksanakan proses pembelajaran tidak memiliki kewenangan yang memadai. Akibatnya, peningkatan mutu pendidikan menjadi tidak memadai pula.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan pada masa orde baru lebih diarahkan pada penyeragaman. Tilaar dalam Tati, (2017) menjelaskan bahwa pendidikan dimasa ini diarahkan kepada uniformitas atau keseragaman dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan tidak diarahkan kepada peningkatan kualitas melainkan pada target kuantitas.

Pada masa orde baru, penataran P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila) dan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) disebut-sebut sebagai perwujudan bahwa pendidikan nasional pada era orde baru selalu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) menekankan bahwa setiap siswa dan warga negara umumnya harus taat kepada negara tanpa dikenalkan hak-haknya. Oleh karenanya, produk yang lahir dari mata pelajaran PMP adalah orang-orang yang apatis, penakut dan cenderung mengikuti budaya "petunjuk dari atas". Darmaningtyas dalam Sugiyono et al., (2017), menyebutkan bahwa selain penataran P4 dan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP), terdapat juga politisasi lainnya dalam proses pendidikan zaman orde baru. Ketika Nugroho

Notosusanto menjabat sebagai menteri pendidikan (1983-1985), dimunculkan mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa (PSPB). PSPB dinilai sebagai upaya hegemoni pendidikan yang lekat dengan nuansa politis karena materinya hanya terfokus kepada peranan Angkatan Darat (AD) dalam menghadapi PKI tahun 1965-1966. Hal yang sama ditegaskan pula oleh Naredi, (2019) bahwa PSPB berisi sejarah militer dan legitimasi kekuasaan pada masa orde baru. Tujuan PSPB menurut Notosusanto adalah untuk memperluas dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk generasi muda. Selain itu, pembelajaran PSPB adalah untuk meningkatkan cinta kepada tanah air. Melalui mata pelajaran PSPB diharapkan secara evolutif para lulusan pendidikan formal memiliki apresiasi yang tinggi terhadap ABRI, PMP, P4. Sehingga dapat dikatakan bahwa PSPB merupakan upaya pemerintah untuk membentuk watak bangsa Indonesia (Naredi, 2019; Sugiyono et al., 2017). Beberapa kebijakan pokok pemerintah orde baru dalam bidang pendidikan adalah:

a. Relevansi pendidikan

Relevansi pendidikan merupakan penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, IV dan V. Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Maka langkah pemerintah adalah dengan membentuk kelompok belajar (kejar). Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta aksara yang berusia 10 sampai 45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar.

b. Pemerataan pendidikan

Kebijakan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui wajib belajar sekolah dasar. Maka langkah yang diambil pemerintah adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Namun ternyata dalam prakteknya masih sulit dilaksanakan sehingga pemerintah mereduksinya menjadi wajib belajar 6 tahun. Program ini berhasil dilaksanakan dalam waktu kurang dari 10 tahun sehingga program sebelumnya, yakni wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah dirasa sudah bisa untuk diterapkan. Pada tanggal 02 Mei 1994 bertepatan dengan hari pendidikan nasional, presiden Soeharto mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1994. Kedua, pembangunan SD inpres. Fokus utama pendidikan saat itu adalah meeningkatkan

kualitas pendidikan dasar melalui pemberantasan buta huruf. Keberhasilan program wajib belajar ditandai dengan partisipasi sekolah dasar (SD) dari angka 1,4 persen naik menjadi 89,91 persen akhir pelita IV.

c. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan masa orde baru lebih mengedepankan dua jalur dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Jalur pendidikan umum adalah jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar (SD atau yang sederajat), pendidikan menengah (SMP hingga SMA atau yang sederajat) dan pendidikan tinggi (Universitas). Sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan kejuruan yang dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan dilaksanakan pada tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas hingga tingkat tinggi dengan berbagai variasi dan orientasi. Orientasi pendidikan kejuruan ini diarahkan antara lain kepada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumahtanggaan, pelayanan jasa dan lain-lain.

Penerapan sistem pendidikan masa orde baru sangat lekat dengan nuansa militerisme. Pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tingkat atas diberlakukan kebiasaan-kebiasaan yang identik dengan militerisme seperti kewajiban baris-berbaris hingga pemberian saksi yang bersifat fisik bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Di tingkat perguruan tinggi, dibentuknya resimen mahasiswa (menwa) yang merupakan manifestasi militerisme dalam sistem pendidikan nasional. Y.B Mangunwijaya dalam tulisannya mengkritik sistem pendidikan zaman orde baru yang cenderung bersifat militerisme seperti itu. Menurutnya, pendidikan sejati sudah kehilangan maknanya pada masa orde baru seperti yang di tulisnya berikut ini: "sudah selama 30 tahun lebih, 30 juta anak-anak kita di aniaya setiap hari oleh suatu sistem pengajaran dan pendidikan yang tidak menghargai anak sebagai anak. Mengapa? Bukankah sistem pengajaran dan pendidikan kita berpancasila?" (Sugiyono et al., 2017). Ia pun menilai bahwa apa yang terjadi dalam dunia pendidikan pada masa orde baru sudah menyimpang dari tujuan yang semula di harapkan, sebagaimana yang di tulisnya: kurikulum terselubung dari sistem sekolah saat itu dari TK sampai perguruan tinggi adalah sistem militer, sistem komando, sistem taat, sistem hafalan, dan sistem memeberi instruksi.

Implementasi sistem pendidikan yang cenderung sentralistik dan *uniformity* menjadi ukuran yang dipakai untuk menentukan relevansi pendidikan pada masa itu. Upaya penyeragaman

(*uniformity*) tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan EBTANAS, UMPTN dan sejenisnya yang digunakan untuk menakar intelektualitas peserta didik (Sugiyono et al., 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan zaman orde baru lebih berorientasi pada target dari pada proses dan kualitas pengajaran yang berupa output maupun outcome yang dihasilkan dari sistem yang diterapkan.

Menurut Muzammil (2016), semestinya relevansi pendidikan ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan tujuan nasional. Sebab, tidak semua daerah mempunyai kebutuhan yang sama, serta tidak semua peserta didik mempunyai kemampuan yang sama dalam belajar dan bertumbuh. Sehingga relevansi tidak menjawab persoalan pendidikan. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur dan tersebar dala wilayah geografis antar pulau yang sangat luas dan beragam, tentunya tidak realistis untuk menentukan suatu standar relevansi yang sama dalam pendidikan nasional.

d. Guru dan Peserta Didik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelenggaraan pendidikan pada masa orde baru diorientasikan untuk menyokong pembangunan ekonomi, maka dapat kita gambarkan bahwa peserta didik pada masa ini dibentuk untuk menjadi calon pekerja yang diharapkan dapat turut menggerakkan roda perekonomian negara setelah lulus sekolah nanti dan kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara.

Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak digembleng untuk mengabdikan kepada rakyat tetapi dipola dan dibentuk untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan. Hal ini dinilai oleh Safei et al., (2020) bahwa orientasi pendidikan orde baru bukanlah terutama pada pengembangan pribadi dan kematangan peserta didik tetapi justru pada pasar tenaga kerja yang akan menampung siswa yang telah selesai dalam pendidikan formalnya. Dalam pendidikan zaman orde baru, peserta didik tidak dididik untuk menjadi seorang pemikir, kreator atau orang yang pada nantinya mampu menciptakan inovasi yang akan berguna bagi bangsa dan negaranya kelak. Akan tetapi dididik untuk menjadi manusia-manusia yang lemah mental, tidak berdaya kritis dan selalu mematuhi perintah atasan. Guru selalu menjadi pusat kebenaran, sedangkan siswa hanya diposisikan sebagai obyek yang harus selalu mematuhi dan mengiyakan kebenaran yang di katakan oleh guru.

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seperti yang di ungkapkan oleh Pradipto dalam (Sugiyono et al., 2017) bahwa guru hanya berperan

sebagai pawang yang menjejali anak didiknya dengan sebrek materi ajar. Proses belajar hanya berjalan searah tanpa ada dialog dan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, apalagi menjawab dengan perspektif lain apa yang dikatakan oleh guru. Peran guru dalam pembelajaran adalah lebih banyak memberi hafalan dengan cara-cara indoktrinasi tanpa memberi ruang kepada siswa untuk berpikir kritis, apalagi menyampaikan gagasannya. Materi hafalan yang diberikan guru harus dihafal sesuai materi yang diberikan. Hal ini justru memunculkan persaingan di dalam ruang-ruang kelas. Siswa yang memiliki kemampuan menghafal tinggi akan memperoleh nilai tinggi, sebaliknya siswa dengan kemampuan menghafal rendah memperoleh nilai rendah.

Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik nyaris tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru. Mangunwijaya dalam (Sugiyono et al., 2017) menilai fungsi dan peran guru telah tereduksi hanya sekedar sebagai penatar, instruktur, birokrat, komandan atau pawang. Anak atau peserta didik tidak lagi dilihat sebagai anak, melainkan sebagai kader mini politik atau sumber daya. Sekolah pun telah kehilangan arti sejatinya karena hanya menjadi kelas-kelas penataran. Sekolah menjadi ajang kompetensi, lomba ranking dan target prestasi seperti yang diinginkan oleh dunia bisnis pembelajaran yang tidak adil.

Realitas yang demikian mengakibatkan siswa bukannya belajar untuk mengembangkan diri tetapi belajar untuk mendapatkan pengakuan lewat ranking untuk memperoleh prestise keluarga. Pembelajaran seperti ini jelas mengabaikan aspek keterampilan dan afeksi sehingga berpengaruh terhadap outcome yang diperoleh kelak.

e. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum sangat penting untuk mengiringi kemajuan bangsa dan Negara. Kurikulum menjadi penentu masa depan anak bangsa yang akan meneruskan pembangunan bangsa. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan tujuan meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang ada di sekolah. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari intervensi penguasa, sebab peran negara sangat

sulit untuk di pisahkan dari proses pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Apple, (2013) yang menyebutkan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh karena itu dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik dari suatu sistem kekuasaan.

Pada dasarnya kurikulum harus bersifat fleksibel dan dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini penting agar terbuka kesempatan bagi guru untuk memberikan bahan pengajaran yang penting dan diperlukan siswa. Fleksibilitas kurikulum ini tentu saja disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, kurikulum berfungsi untuk membantu kematangan pribadi siswa agar berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolahnya, serta membantu siswa menyadari kepentingan masyarakat dan menghayati masyarakatnya sendiri. Selanjutnya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak didik sehingga bisa memahami kompleksitas lingkungan sosial dan peradabannya serta mampu menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar.

Dalam intervensi terhadap bidang pendidikan di Indonesia di masa orde baru, kebijakan pendidikan yang diterapkan mirip dengan kebijakan kolonial. Praktek pendidikan disterilkan dari politik praktis. Kurikulum dan buku pelajaran tertentu disusun memuat versi politik pemerintah. Pada masa ini, masyarakat umumnya tidak menyadari bahwa di balik kurikulum pendidikan ternyata terselip kepentingan penguasa. Inilah yang kemudian disebut sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Hal ini tampak dalam sistem pendidikan era orde baru dimana proses pendidikan, kurikulum, metodologi dan aspek-aspek pendidikan lainnya merupakan pengejawentahan orde baru saat itu.

Pendidikan pada masa orde baru telah merumuskan kurikulum secara bertahap, mulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 hingga kurikulum 1994 sebagai berikut:

a. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 sebenarnya melanjutkan kurikulum 1964 yang merupakan warisan orde lama. Perubahan yang dilakukan hanya berupa pergantian struktur kurikulum dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Orde baru mengkalim bahwa kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Kurikulum 1968 ini merupakan awal dimasukkannya konsep-konsep pedagogis, meskipun

tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Secara teknis, konsep pedagogis yang terdapat dalam kurikulum 1968 masih banyak yang kurang dimengerti oleh para pelaksananya, bahkan mungkin oleh penyusun kurikulum itu sendiri (Surakhmad dan Sularto dalam Sugiyono, 2017:122).

b. Kurikulum 1975

Kurikulum berupaya agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (*management by objective*). Metode, materi dan tujuan pengajaran dirumuskan secara detail dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) atau yang kemudian dengan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satu pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Hal yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah kewajiban bagi guru untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung.

Asvi Warman Adam dalam Sugiyono et al., (2017), menekankan bahwa pada kurikulum 1975, khususnya pada pendidikan sejarah, peserta didik harus diajarkan untuk menjiwei nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, saat penggodokan kurikulum ini, beberapa pihak juga meminta agar Kurikulum 1975 juga memuat sejarah nasional, lagu-lagu perjuangan, kisah-kisah kepahlawanan, bahkan hingga pelajaran tentang pertahanan dan strategi nasional. Dalam pandangan Mc.Greggor, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan agar peran politik orang-orang militer dapat diterima secara luas serta membuat masyarakat semakin memahami maksud pertahanan nasional dan dwifungsi ABRI.

c. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 lebih mengedepankan proses *skill approach* yang dianggap lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum ini sering juga disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif (CBSA) atau *student active learning* (SAL). Walaupun kurikulum CBSA ini menjadikan siswa sebagai subyek belajar, namun proses pendidikan selalu mendapat kontrol dari pihak instruktur.

d. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum terdahulu, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pengembangan kurikulum 1994 meneruskan proses *skill approach* atau keterampilan proses serta pendekatan belajar aktif. Kurikulum

1994 ini dinilai sebagai penambah beban belajar siswa karena ada penambahan mata pelajaran yang cukup signifikan, termasuk muatan lokal maupun muatan nasional.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia selalu dinamis dan adaptis sesuai dengan kepentingan penguasa. Pendidikan zaman orde baru memperlihatkan keterlibatan tentara (Angkatan Darat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang di dalamnya turut mempengaruhi arah kebijakan di Indonesia. Pendidikan pada masa orde baru berpijak pada penerapan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang dipolitisasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun dalam penerapannya tujuan pendidikan tidak dilakukan secara murni untuk mencerdaskan bangsa. Fokus utama pendidikan saat itu adalah peningkatan indikator kualitas pendidikan dasar. Keberhasilan program wajib belajar ditandai dengan partisipasi sekolah dasar (SD) dari angka 1,4 persen naik menjadi 89,91 persen akhir pelita IV.

Kebijakan-kebijakan pendidikan yang diimplementasikan zaman orde baru menjadi pola dan ciri khas rezim pemerintahan kala itu. Kesalahan-kesalahan kebijakan yang diterapkan dalam dunia pendidikan itu hendaknya mengajarkan kita sebagai pendidik dan para pengambil kebijakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa kini dan masa depan., mampu membedakan baik dan buruknya sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang salah dan sesat dalam melaksanakan usaha-usaha pendidikan.. Upaya lain yang diperlukan adalah perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkala dari pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan terhadap sistem dan praktek pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Evaluasi pendidikan diperlukan untuk menilai dan mengukur sejauh mana kebijakan yang sudah diimplementasikan dapat menjawab persoalan kualitas dan kuantitas pendidikan serta sejauh mana *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari pendidikan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Apple, M. W. (2013). *Knowledge, power, and*

- education: *The selected works of Michael W. Apple*. Routledge.
- Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973). *Historia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.19184/jhist.v3i2.23561>
- Fatgehipon, A. H. (2010). *Tentara dan Pergolakan Politik di Indonesia: Membongkar mitos melanjutkan reformasi internal* (1st ed.). Cahaya Pineleng.
- Febriyanti, F., & Haryanti, N. D. (2021). Kekerasan Rezim Orde Baru Dalam Empat Cerpen Indonesia Modern Serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA/MA. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* (e-ISSN: 2797-0477), 1(04), Article 04.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). *Propaganda Orde Baru 1966-1980*. 1(1), 40–50.
- Hanugrah, S. N., & Hardi, E. (2019). *Melihat Penyimpangan Politik Masa Orde Baru dari Kaca Mata Karya Sastra (Sebuah Studi Historiografi)*.
- Hariyadi, A. R. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Kurniawati, K. (2017). Mencari Makna Dalam Sejarah: Meninjau Kembali Historiografi Indonesiasentris Sebagai Sumber Belajar Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 13–20. <https://doi.org/10.21009/JPS.042.02>
- Mukodi, M. (2016, December 29). *Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia Sebuah Refleksi Historis*.
- Muzammil, A. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis). *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i2.2537>
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>
- Naredi, H. (2019). PSPB dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(1). <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20731>
- Putra, I. (2023). Karakter Haluan Negara dari Masa ke Masa dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.316>
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
- Safei, S., Hudaidah, H., & Universitas Sriwijaya. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3253>
- Saputro, A. (2018). Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 2(2), Article 2. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1074>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sugiyono, S., Aman, A., Kumalasari, D., Sutopo, & Nuryanto, A. (2017). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. *MIMBAR PENDIDIKAN*, 3(2), 113–136. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i2.13949>
- Syahputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Peranan Penting Sejarah Lokal

Megiridha Loppies Pendidikan Zaman Orde Baru

sebagai Objek Pembelajaran untuk
Membangun Kesadaran Sejarah Siswa.
*Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti
Sejarah*, 4(1), 85–94.
<https://doi.org/10.17509/historia.v4i1.27035>

Tati, A. (2017). Kurikulum Pendidikan di SD dan
SMA Pada Masa Orde Baru. *Jurnal
Pendidikan Sejarah*, 4(2), 89–102.
<https://doi.org/10.21009/JPS.042.09>

Toni, & Utama, A. S. (2021). Pengaruh Rezim
Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di
Indonesia. *Journal of Criminology and
Justice*, 1(1), Article 1.